



Perangkat

Analisis Pemangku Kepentingan

Latar Belakang

Membangun dan melaksanakan sistem peringatan dini tsunami secara efektif memerlukan kontribusi dan koordinasi dari beragam individu dan lembaga baik di tingkat daerah, pusat, maupun internasional. Dokumen ini menjelaskan secara singkat mengenai organisasi dan pemangku kepentingan dari tingkat daerah sampai internasional yang terlibat dalam *Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS)*.



Source : IOC-tsunami.org

Tingkat Internasional

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), yang didirikan pada tahun 1960, merupakan komisi untuk ilmu dan layanan bidang kelautan yang memfasilitasi kerjasama internasional. IOC dikoordinasikan oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) dan bekerjasama dengan World Meteorological Organization (WMO), United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) serta mitra penting lainnya, turut menyumbangkan keahliannya serta berbagi data dan pengetahuan antar negara maupun regional. International Coordination Group (ICG) merupakan anak organisasi UNESCO-IOC yang mempromosikan, mengorganisasi, dan mengoordinasi layanan mitigasi tsunami tingkat regional, termasuk mengeluarkan peringatan.

Japan Meteorological Agency (JMA) dan *Pacific Tsunami Warning Center (PTWC)* menyediakan layanan peringatan untuk area Samudera Pasifik. Sementara layanan yang bersifat temporer juga disediakan untuk wilayah Samudera Hindia. Pemantauan aktivitas seismik dan samudera membutuhkan jaringan dan kerjasama internasional, termasuk di dalamnya beberapa negara dan lembaga internasional seperti United States Geological Survey (USGS), JMA dan German Research Centre for Geoscience Potsdam (GFZ).

Kerjasama internasional tersebut mendukung Indonesia dengan menyediakan informasi panduan, bantuan teknis, serta dukungan organisasi dan kebijakan dalam pengembangan InaTEWS dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat.

Tingkat Pusat

Pemangku kepentingan yang terlibat di tingkat pusat adalah pemerintahan pusat, pimpinan nasional, sektor swasta, lembaga akademis, dan gabungan organisasi nasional serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lembaga Pemerintahan tingkat Pusat bertanggung jawab terhadap:

1. **Kebijakan Nasional** (Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana, Surat Keputusan) dan **kerangka kerja** (“Skenario Besar”) untuk peringatan dini
2. **Sistem Teknis** (kajian risiko, pemantauan seismik dan samudera, *modeling*, analisis data dan pengeluaran peringatan serta penyebaran kepada media dan lembaga-lembaga perantara)
3. **Dukungan** masyarakat dan pemerintah daerah (peningkatan kapasitas, akses ke peringatan)
4. **Koordinasi dan kemitraan** antara pemerintah pusat, organisasi regional dan internasional

Tingkat Daerah

Masyarakat di daerah menempati bagian paling inti dalam sistem peringatan dini yang efektif. Pemangku kepentingan utama di antaranya adalah Pemerintah Daerah (Pemda), sektor swasta, pemimpin masyarakat, lembaga akademis, dan LSM. Peran serta masyarakat, khususnya masyarakat berisiko, penting bagi sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam pengkajian bencana, sadar akan adanya bahaya dan dampak potensial dari bahaya yang mereka hadapi, paham peringatan yang diberikan, dan mampu mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian atau kerusakan.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang berlainan:

Pemda merupakan pelaku utama yang bertanggung jawab atas:

1. **Kebijakan di tingkat daerah** (Peraturan Daerah Surat Keputusan), **panduan di tingkat daerah** (*Standard Operation Procedure*, skenario) dan **rencana-rencana** (evakuasi, darurat, kontijensi) untuk peringatan dini tsunami dan respon
2. Pengembangan dan pemeliharaan **sistem teknis** untuk penyebaran peringatan dan panduan respon bagi pemangku kepentingan dan masyarakat daerah
3. **Pengetahuan, peningkatan kesadaran**, dan **geladi** di tingkat daerah (peningkatan kapasitas, penyebaran pengetahuan tentang bahaya, peringatan dini dan respon) dengan perhatian khusus pada sektor pendidikan
4. **Koordinasi dan kemitraan** antar pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat

LSM khususnya memainkan peran dalam pengembangan pengetahuan dan kesadaran terkait dengan respon masyarakat terhadap peringatan dan bencana.

LSM mengadvokasi agar kesiapsiagaan tsunami tetap menjadi agenda otoritas serta memfasilitasi program perencanaan kesiapsiagaan dan tanggap darurat di tingkat akar rumput. LSM juga dapat berperan sebagai pelaksana, pemantau, dan penilai mekanisme peringatan dini tsunami di tingkat daerah.

Sektor Swasta bertanggung jawab mengembangkan langkah-langkah kesiapsiagaan yang bermanfaat bagi keamanannya sendiri. Termasuk mengembangkan fasilitas peringatan dini dan respon, prosedur, serta peningkatan kesadaran untuk personel, manajer, dan konsumen. Sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sektor swasta dapat menyediakan dukungan keahlian, keterampilan, dan sumber daya ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Ilmuwan dan akademisi di daerah memberikan masukan teknis dan ilmiah untuk membantu pemerintah dan masyarakat terkait kajian risiko, perencanaan, desain layanan peringatan, pertukaran data, dan penerjemahan informasi teknis atau ilmiah ke dalam pesan yang jelas dan lugas.

Masyarakat berisiko merupakan pelaku utama dalam menyelamatkan nyawa dan aset. Ini memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai bahaya dan risiko, tanda peringatan dan isi pesan, serta tindakan yang cepat dan tepat. Kearifan lokal tentang tsunami harus digali, dievaluasi, dan digunakan bilamana sesuai.



© GTZ - is

Evakuasi		Respon		Peningkatan kesadaran		Rencana Kegiatan 2010
Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	
Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	

Cara Melakukan: Analisis Pemangku Kepentingan

Mengembangkan dan melaksanakan sistem peringatan dini tsunami yang efektif membutuhkan kontribusi dan koordinasi dari beragam pelaku. Analisis pemangku kepentingan adalah perangkat yang membantu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap pelaku yang terlibat.



© GTZ - IS

06

Tujuan Analisis Pemangku Kepentingan

1. Mengidentifikasi pelaku utama dan pelaku lain yang terlibat
2. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pelaku sesuai dengan elemen utama peringatan dini tsunami
3. Mengidentifikasi gap kelembagaan untuk peringatan dini tsunami
4. Memberikan informasi dasar untuk koordinasi pemangku kepentingan

Tindakan

Analisis pemangku kepentingan harus diterapkan sebagai perangkat yang melibatkan seluruh pelaku utama yang terkait dengan sistem peringatan dini tsunami secara partisipatif. Peserta haruslah mengenal dengan baik rancangan InaTEWS dan elemen utama peringatan dini.

Tugas fasilitator adalah menjelaskan tujuan, metodologi, dan matriks yang digunakan. Analisis pemangku kepentingan terdiri dari 3 langkah. Waktu yang dibutuhkan antara dua sampai empat jam tergantung pada jumlah pelaku yang terlibat dan mendalamnya diskusi.



© GTZ - IS

LANGKAH PERTAMA: Identifikasi pelaku

- Identifikasi pelaku melalui curah pendapat
- Penentuan pelaku utama
- Memastikan semua pelaku teridentifikasi

LANGKAH KEDUA: Dokumentasi peran dan tanggung jawab

- Peserta mengisi matriks yang ditujukan pada lembaga yang diwakili, menjelaskan secara ringkas aspek-aspek yang ditangani oleh lembaga
- Sebagai tambahan, untuk masing-masing topik yang diidentifikasi mereka harus menentukan peran peserta (pengambilan keputusan, pelaksanaan, alih pengetahuan)
- Bagi semua lembaga yang terdaftar namun tidak terwakili selama proses analisis, peserta perlu mengidentifikasi topik serta peran sebanyak mungkin (ditandai dengan warna yang berbeda). Kemudian, informasi tersebut harus dikonfirmasi

LANGKAH KETIGA: Analisis Matriks

- Merevisi dan mendiskusikan matriks yang sudah dilengkapi dengan menggunakan elemen-elemen utama: kesesuaian peran dan tanggung jawab yang diuraikan, fungsi ganda dan/atau gap
- Mendokumentasikan ringkasan atau rekomendasi yang ada
- Menentukan kegiatan tindak lanjut



Matriks untuk Analisis Pemangku Kepentingan

Peran dan Tanggung jawab													
Pelaku	Analisis risiko		Pemantauan & peringatan		Penyebaran peringatan		Evakuasi		Respon		Peningkatan kesadaran		Rencana kegiatan 2010
	Pelaku Utama	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	
BPBD	X	PL			X	PL	X	PK	X	PK			Development official hazard map
RAPI					X	PL	X						
Marine & Fishery	X	TP											
NGO	X												School education
Indonesian Red Cross	X				X	PL	X	PL					Community Preparedness
<i>contoh</i>													
Pelaku lain	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	Topik	Peran	
BAKOMINFO													Development Perda tata ruang
Dinas Pendidikan													
Dinas Kimpraswil	X												
TAGANA							X						
WALHI	X												
TNI & POLRI							X	PL	X	PL			

08

Peran:
 PK – Pengambil Keputusan
 PL – Pelaksana
 TP – Alih Pengetahuan



